

**PRODUKTIVITAS KERJA PETUGAS UKUR  
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



Disusun oleh :

**JARWADI**  
**NIM. 9871388**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

## INTISARI

Badan pertanahan Nasional dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, tenaga ahli yang cakap, terampil, profesional, disiplin dan berdedikasi tinggi serta akhlak yang tidak tercela. Salah satu kegiatan dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan adalah pengukuran dan pendaftaran tanah. Sehingga petugas ukur sebagai aparat pelaksana dalam pengukuran harus memenuhi kriteria diatas.

Tujuan dari penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui produktivitas kerja petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. 2). Untuk mengetahui pengaruh pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dengan produktivitas kerja petugas ukur.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Populasi penelitian adalah semua petugas ukur yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan gambar ukur yang dihasilkan selama lima tahun terakhir (1997-2001). Untuk menentukan kualitas sampel diambil sebanyak 10% dari gambar ukur yang dihasilkan pada bulan Nopember-Desember 2001. Sedangkan analisa yang digunakan teknik analisa deskriptif. Untuk penyajian datanya digunakan tabel. Data mengenai pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja serta produktivitas kerja petugas ukur disusun dalam tabel frekuensi yang kemudian dianalisa dengan tabulasi silang.

Dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ; 1). Produktivitas kerja petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali adalah sedang. 2). Secara kuantitas, latar belakang tingkat pendidikan kurang begitu berpengaruh terhadap produktivitas kerja petugas ukur, sedangkan secara kualitas, gambar ukur sudah dapat memberikan jaminan kepastian batas, letak dan luas.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>INTISARI</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Pembatasan Masalah .....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	6
B. Kerangka Pemikiran.....	11
C. Anggapan Dasar .....	14
D. Batasan Operasional.....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	16
B. Daerah Penelitian .....	16
C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	16
D. Jenis dan Cara Pengumpulan Data .....	17
E. Teknik Analisis Data .....	19

<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN</b>	
	<b>KABUPATEN BOYOLALI</b>	
	A. Struktur Organisasi.....	22
	B. Kepegawaian .....	24
	C. Sarana dan Prasarana.....	25
	D. Hasil Kegiatan Pengukuran dan Pendaftaran Tanah.....	27
<b>BAB V</b>	<b>PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA</b>	
	A. Penyajian Data.....	28
	B. Analisis Data .....	36
<b>BAB VI</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	57
	B. Saran.....	58
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	RIWAYAT HIDUP	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pembangunan jangka panjang kedua disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara agar aparat negara lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, keadilan dan berwibawa sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat sesuai dengan hati nurani rakyat.

Dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan maka dibentuk Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai tugas membantu presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan tanah, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. salah satu kegiatan pendaftaran tanah tersebut adalah pengukuran dan pemetaan guna memberikan jaminan kepastian hukum mengenai letak, batas dan luas bidang tanah.

Untuk mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan tersebut, perlu dukungan tersedianya aparat pelaksana yang mampu dan terampil dalam arti professional dan berkualitas, disiplin dan berdedikasi tinggi. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan manusia akan tanah terus meningkat, sedangkan luas tanah yang tersedia bersifat tetap. Dengan demikian peran petugas ukur sebagai sumber pelaksana dalam proses kegiatan pendaftaran tanah sangatlah berarti atau dapat dikatakan bahwa petugas ukur merupakan ujung tombak bagi keberhasilan kegiatan pendaftaran tanah yang mempunyai tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

Salah satu tugas Kantor Pertanahan adalah melakukan pengukuran bidang tanah yang dilakukan oleh petugas ukurnya. Melihat fakta Kabupaten Boyolali yang terus berkembang, maka permohonan yang masuk ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali cukup tinggi. Dari permohonan pengukuran yang masuk, tidak semua permohonan dapat terselesaikan. Dengan demikian tentunya banyak hambatan/kendala dalam kegiatan pengukuran tersebut.

kerja petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupten Boyolali, sehingga dalam penelitiaan ini penyusun memilih judul: “PRODUKTIVITAS KERJA PETUGAS UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah yang penyusun kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar produktivitas kerja petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah ?
2. Apakah faktor pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja petugas ukur turut berpengaruh terhadap produktivitas kerja petugas ukur ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu, dana, pengetahuan dan kemampuan penyusun, maka penyusun membatasi masalah ini dengan memfokuskan sasaran penelitian sebagai berikut :

1. Produktivitas kerja petugas ukur dinilai dari jumlah gambar ukur yang dihasilkan oleh setiap petugas ukur per tahun, dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun terakhir (1997-2001).
2. Gambar Ukur yang diteliti adalah hasil kegiatan pengukuran dalam permohonan sporadik/permohonan rutin.

3. Kualitas Gambar Ukur dalam penelitian ini dinilai dari kepastian letak (rekonstruksi batas), batas (kontradiktur delimitasi), dan luasnya (dihitung dua kali).
4. Faktor-faktor yang dipakai untuk menilai petugas ukur dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja.
5. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi kegiatan pengukuran di lapangan (jarak, transportasi, keadaan medan dan kebijakan pemberi tugas) selain faktor-faktor di atas dalam penelitian ini diabaikan.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tingkat produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja dengan produktivitas petugas ukur.

##### 2. Kegunaan penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan masukan/kajian untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.



- b. Bahan masukan/kajian untuk menetapkan tolok ukur kualitas petugas ukur sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian, hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat Produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut : kategori tinggi 56%, kategori sedang 33% dan kategori rendah 11%.
2. Secara kuantitas, latar belakang tingkat pendidikan tidak ada pengaruh yang positif/menunjang terhadap produktivitas sedangkan latar belakang pelatihan/kursus dan pengalaman kerja ada hubungan positif/menunjang terhadap produktivitas.

Secara kualitas, latar belakang tingkat pendidikan ada hubungan yang positif/menunjang terhadap produktivitas, tetapi latar belakang pelatihan/kursus dan pengalaman kerja tidak ada pengaruh positif/menunjang terhadap kualitas gambar ukur. Gambar ukur yang dihasilkan oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dapat dikatakan berkualitas baik. Hal ini mengingat dari 356 gambar ukur yang dijadikan sampel, 96,07% mempunyai kriteria baik dan hanya

petugas ukur Kantor Pertanahan Boyolali sudah dapat memberikan jaminan kepastian letak, batas dan luas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya kursus atau pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petugas ukur.
2. Perlu diadakannya penelitian lebih lanjut mengenai adanya faktor-faktor lain yang ada hubungan positif/menunjang produktivitas petugas ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1997. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997.
- Anonim, 1997. Petunjuk Teknis PMNA No 3 Tahun 1997.
- Arikunto, Suharsimi, 1993. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Rineka Cipta, Jakarta.
- Gaol, Jimmy L, 1988. "*Manajemen Kepegawaian*", Karunika, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 1997. Hukum Agraria Indonesia "*Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria*" Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Kinder, Rex, 1997. "*Beberapa Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Badan Pertanahan Nasional*", Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang Dan Pertanahan, Yogyakarta.
- Satriono, Aris, 2000 "*Studi Tentang Produktivitas Petugas Ukur Di Kantor Pertanahan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah*", STPN, Yogyakarta.
- Setiawan, Iwan, 2000 "*Produktivitas Petugas Ukur Di Kantor Pertanahan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat*", STPN, Yogyakarta.
- Perangin, Effendi, 1989. "*Hukum Agraria di Indonesia Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*", Rajawali, Jakarta.
- Siagian, P Sondang, 1988. "*Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*", Pertja, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, edisi revisi 1995, "*Metodologi Penelitian Survey*", LP3ES, Jakarta.
- Soemadi, Herutomo, 1996. "*Pedoman Penulisan Skripsi*", STPN, Yogyakarta.
- Sudjana, 1996. "*Pengantar Statistika*", Tarsito, Bandung.
- Surakhmad, Winarno, 1990. "*Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Teknik*", Edisi ketujuh, Tarsito, Bandung.
- Triono Bambang, 1982. "*Pengertian Alat Ukur*" Direktorat Pendaftaran Tanah.